

ISLAM DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KESULTANAN TERNATE

Asmiah

Mahasiswa Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang
Emil.asmiah20@gmail.com

Abstract

The Sultanate of Ternate is a traditional government institution, which is the center of life and religious order that has been lived by the people of Ternate for centuries. The Sultanate of Ternate was founded in the second half of the 15th century. The first Sultan, Zainal Abidin, ruled in the period 1486-1500. Islam's contribution to the growth and development of the sultanate was in the form of structural change, from Kolano (kingdom) to sultanate. In the Kolano form, genealogical and territorial ties are factors of integration. Meanwhile, in the form of a Sultanate, Islam is an integration factor. Several problems that are the center of attention in this research are, (1). The entry and development of Islam in Ternate, (2). Religious institutions. (3). The role of Islam in government. In this research, several approaches will be used involving various disciplines. The main sources are manuscripts, both published and unpublished. Apart from foreign manuscripts, Malay and local manuscripts are needed. Oral sources from local historians, genealogy from the Sultans and other relics. It is hoped that this research can provide an overview of religious life in the past, which is very useful for understanding religious life today. This kind of local history research is of course also useful for filling in the National History framework.

Keywords: Religious institutions (life and afterlife), Islamic Religion, Sultanate of Ternate.

LATAR BELAKANG

Pada akhir abad ke lima belas, Kesultanan Ternate didirikan. Dari tahun 1486 hingga 1500, Zainal Abidin menjadi Sultan pertama. Sebenarnya Kerajaan Ternate yang sudah ada sejak pertengahan abad ke-13 berkembang lebih jauh di bawah kesultanan ini. Pemerintahan Zainal Abidin (1486–1501) menandai perubahan bentuk kolano (kerajaan) menjadi kesultanan. Sebelum menjadi Sultan pertama, Zainal Abidin merantau ke Jawa dan belajar agama di Giri. Ia mendirikan lembaga pendidikan agama Islam di Ternate sekembalinya. Penyuluh agama selanjutnya didatangkan dari Pulau Jawa untuk mengajarkan agama.

Sejak pemerintahan Zainal Abidin (1486–1510), Islam diakui sebagai agama resmi negara. Zainal Abidin pun memberikan gelar sultan kepada setiap raja Ternate berikutnya. Peralihan dari kolano

(kerajaan) ke kesultanan menyiratkan terbentuknya beberapa lembaga baru dalam kerangka pemerintahan. Lembaga akhirat bobato (yang mengurus urusan keagamaan) ditambahkan ke dalam struktur pemerintahan kerajaan Ternate guna mengakomodasi unsur-unsur Islam dalam politik Ternate. Transformasi Zainal Abidin dari kolano (kerajaan) menjadi kesultanan, menurut Djoko Suryo, terutama dilatarbelakangi oleh pertimbangan politik. Mengingat bentuk kesultanan merupakan bentuk yang paling dikenal luas di sejumlah ranah elite politik Ternate, maka tampaknya pilihan ini sengaja dibuat. Ketika abad kesembilan belas dimulai, Sultan menjabat sebagai kepala negara, dibantu oleh Jogugu yang berkuasa, panglima perang Kapitan Laut, hakim Hukum, kepala urusan agama Kadhil Kali, sekretaris, dan sekelompok pejabat yang mencalonkan diri. Istana. Dewan kerajaan, atau Bobatu, juga hadir.

Kehidupan akhirat Bobato merupakan salah satu peran paling signifikan yang dimainkan oleh kelompok elite di Kesultanan Ternate yang berperan sebagai pemuka agama Islam. Lembaga ini sangat penting bagi masyarakat Ternate karena peran penting agama di dalamnya. Kesetiaan bobato di akhirat ditujukan kepada penguasa kerajaan, yaitu penguasa yang kekuasaannya dikukuhkan oleh sultan. Bahkan merambah ke alat kekuasaan penguasa (penguasa) atau penerus rasul Tubaddilur, juga menjadi keabsahan Bobato di akhirat. Leirissa, R.Z.op. cit. (2002).

Elit Kesultanan Ternate terbagi menjadi dua kelompok dalam struktur pemerintahannya: mereka yang menguasai urusan pemerintahan (bobato dunia) dan mereka yang menguasai urusan agama (bobato akhirat). Kedua strata sosial dan politik ini mewakili eselon atas masyarakat. Kedua faksi ini mempunyai kepentingan strategis sebagai elit penguasa antara rakyat dan sultan. Karena inilah analisis utama mengapa kelompok ini begitu penting bagi masyarakat Ternate, maka struktur kelompok ini menjadi fokus penelitian ini. Dengan demikian, penjelasan ini akan menyoroti pentingnya dan kewibawaan kaum elite dalam masyarakat Ternate.

STRUKTUR PEMERINTAHAN KESULTANAN

Sama halnya dengan masyarakat kerajaan-kerajaan Jawa, masyarakat kadaton Ternate mengenal lapisan-lapisan yang tersusun secara hierarkis. Kaum bangsawan dan abdi dalem kerajaan (opas) menduduki jabatan tertinggi berikutnya setelah sultan. Nama atau gelar raja menunjukkan pangkat sosial tertingginya dalam kadaton dan kekuasaannya.

Persoalan tentang kapan dan bagaimana proses masyarakat Ternate membentuk suatu komunitas politik yang

terstruktur hingga kini masih membutuhkan kajian yang mendalam. Menurut Djoko Suryo, proses terbentuknya masyarakat politik dikawasan yang dulunya dikenal dengan istilah *Moluku Kie Raha* (empat kerajaan; Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo). Empat gunung tempat asal cengkeh ini berevolusi sejalan dengan semakin krusialnya peran cengkeh dalam tata perdagangan internasional (Djoko Suryo, *et al.*2001).

Menurut Radjiloen, bahwa sebelum terbentuknya organisasi kerajaan, di pulau Ternate terdapat empat kelompok masyarakat (marga), yaitu *pertama*, marga Tubo (puncak) yaitu sekelompok orang yang mendiami disekitar gunung Gamalama (Gam Lamo: negeri besar). *Kedua*, marga Tobona yang mendiami dataran tinggi foramadiyah. *Ketiga*, marga Tabanga yaitu sekelompok orang yang mendiami hutan, dan *keempat*, marga Toboleu yang mendiami dataran rendah atau pantai. (Radjiloen L, 1982).

Pada tahun 1251, para *momole* (kepala Marga) tersebut melakukan musyawarah yang dikenal dengan nama persetujuan Fora Madiyah. Menurut Abdul Hamid Hasan, dalam persetujuan itu, disepakati tiga butir kesepakatan yaitu; *pertama*, Fora Madiyah atau menduduklah yang benar yaitu menempatkan bentuk organisasi kerajaan dengan tugas dan jabatan masing-masing kepada marga (*momole* dan *sangaji*) dalam struktur pemerintahan dan dewan perwakilan. *Kedua*, *koko la nao* (kolano), artinya tegak supaya kuat. Agar organisasi kenegaraan dapat berjalan dengan efektif dan menjadi kuat maka harus ada pemimpinnya yang disebut kolano, dan *ketiga*, Tara no ate, atau turun kau pikat, yakni setelah tegak organisasi ini maka para pemimpin harus menyatukan semua suku bangsa yang mendiami pulau Ternate. (Abdul Hamid Hasan, 2001).

Satu hal yang menarik bahwa perubahan struktur pemerintahan dari

Kolano ke Kesultanan, tidak otomatis menghilangkan simbol-simbol politik pada ada pada diri *kolano*. Menurut Djoko Suryo, perubahan bentuk dari kolano ke Kesultanan lebih dikarenakan oleh alasan politis. Bentuk kesultanan tampaknya dengan sengaja diambil karena merupakan bentuk yang paling umum dikenal diberbagai kawasan yang berada dalam jangkauan pemahaman elite politik Ternate. (Djoko Suryo et,al; 2021)

Bagi masyarakat Ternate, meski pemerintahan Kolano diganti dengan Kesultanan. Meski begitu, peran dan fungsi kata sultan dan kolano berbeda. Peran kolano terus digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan politik dalam negeri. Sementara itu, peran sultan terutama terfokus pada urusan kebijakan luar negeri. Bahkan, ia menegaskan gelar tertinggi bukanlah sultan melainkan kolona karena hanya kolona yang berwenang mengeluarkan iddin, menurut salah satu sumber.

Adnan Amal (2007) mengatakan.Kewenangan inipun berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, misalnya hanya *kolona* yang memiliki hak-hak veto (*jaib kolano*), atas lembaga legislatif (*Bobato Nyagimoi Setofkange*) sampai sekarang tetap dimilikinya. Bahkan fungsi dan hak yang ada semakin diperluas dengan adanya penggunaan sebutan sultan. Di mana sultan berperan ganda yakni menjalankan fungsi dalam bidang pemerintahan dan keagamaan. (F.S.A. de Clercq, 2001).

Dalam hal agama (*bobato akhirat*), sultan adalah imam agung yang menjaga dan melindungi penyebaran dan kelestarian agama Islam atau kewajiban sultan untuk melindungi dan menyebarkan Islam.Poin inilah menjadi elemen baru yang ditambahkan pada kewajiban-kewajiban tradisional seorang *kolano*.Demikian pula, dengan posisinya sebagai *imam besar*, merupakan fungsi baru yang ditambahkan kepadanya. (Irza Arnita Djafaar, 2005).

Dalam kedudukannya sebagai imam besar, sultan dibantu oleh sejumlah ulama (*Bobato Akhirat*), yang memiliki nama dan gelar sendiri-sendiri. Ulama tertinggi yang membantu sultan di sebut Qadhie, ia diangkat dan diberhentikan oleh sultan, biasanya disebut *Jo Kalem*. Dalam menjalankan tugasnya *Jo Kalem*ini dibantu oleh empat orang imam yaitu; Imam Jiko, Imam Sangaji, Imam Moti dan Imam Jawa. Selain itu terdapat juga Imam Bangsa, yang bertugas mengurus dan menyelesaikan masalah secara khusus yang menyangkut dengan para bangsawan dan keluarganya. (Herry RD.Nachrawy, 2003)

Di bawah para imam ini terdapat para ulama yang disebut *Khatib* yang terdiri dari *khatib Jiko, Jawa, Sangaji, Moti dan Bangsa*.Setiap wilayah yang diperintah oleh seorang sangaji maka diangkat seorang imam distrik dimana wilayah kerjanya mencakup imam distrik.Dalam menjalankan tugasnya imam distrik didampingi oleh para khatib dan mu'addin, begitu pula sampai pada aparat bawahannya imam kampung.Paling akhir dalam sturuktur *Bobato Akhirat* ini ditempati oleh para modin dan muadzin.Sebagai kelengkapan administrasi diangkat seorang khatib juru tulis untuk mengurus dan menyelenggarakan tata usaha hakim syarah kerajaan. (Hanna Willard A& Des Alwi,1996).

Menurut Mudaffar Syah, susunan organisasi kenegaraan Kerajaan Ternate terdiri atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan pemerintahan yang disebut *kolano* (sultan/raja). Fungsi *kolano* yaitu; *pertama*, pemimpin pemerintahan. *Kedua*, melaksanakan keputusan dewan 18. Disamping itu, *kolano* memiliki 2 macam hak prerogatif (hak veto) yaitu Idhin kolano dan Jaib kolano. (Mudaffar Syah,2009).

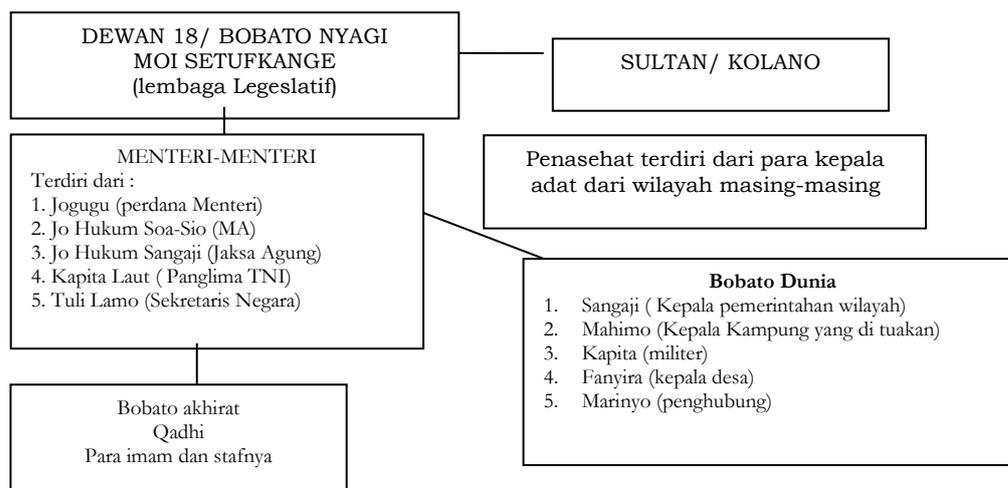
Dalam menjalankan roda pemerintahan sultan dibantu para menteri-

menterinya yang disebut *Bobato Madopolo*, terdiri dari: *pertama*, Jogugu, yaitu mangkubumi atau perdana menteri sekaligus menjabat kepala Staf Angkatan Bersenjata Kesultanan. Dalam bidang pemerintahan *Jogugu* (mangkubumi atau perdana menteri) adalah orang pertama dibawah raja. Menunjukkan betapa besar kekuasaan patih kerajaan itu. Hubungan *jogugu* kerajaan dengan raja diumpamakan sebagai keris dan sarungnya atau madu dan rasa manisnya. Ini berarti bahwa segala tindakannya raja dan *jogugu* harus selalu seia-sekata.

Kedua, Kapita perang atau Menteri Pertahanan dan Keamanan. Selain *jogugu*,

Kapita perang termasuk orang dekat dengan raja. Jika datang menghadap, tempat duduknya tidak jauh dari raja. Karena sebagai pelindung raja, maka jika menghadap raja kedudukannya duduk sejajar. *Ketiga*, Kapita Lau, yaitu Laksamana Angkatan Laut Kesultanan. *Keempat*, hukum Soa-sio, atau Menteri Dalam Negeri. *Kelima*, hukum Sangaji, atau Menteri Luar Negeri, dan *keenam*, Tulilamo atau Menteri Sekretaris Negara. (Shaleh Putuhena, 1987). Hal ini sebagaimana tergambar dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate berikut ini.

Tabel 1
Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate



Sumber: Mudaffar Syah, 2009

Perlu dijelaskan bahwa kedudukan pengurus agama dalam hal ini 'hakim agung kerajaan' juga disebut hakim syarah kerajaan. Dalam hukum adat dikenal sebagai bobato akhirat (Urusan Agama). Tugasnya adalah membidangi syariah agama Islam sebagai syariah kerajaan yang terdiri dari; *pertama*, sultan. Dari tata kehidupan spiritual, sultan adalah imam agung yang berkewajiban menjaga tata tertib dan penyebaran agama. Menjaga dan melindungi, menyebarkan dan

melestarikan agama Islam. (Jusuf Abdulrahman, 2002).

Para sultan di Ternate tidak menyebut dirinya sebagai kalifatullah. Dalam kedudukannya sebagai seorang imam, sultan dibantu oleh para ulama yang memiliki pangkatnya sendiri-sendiri dan dilabelkan dari asal usul mereka. *Kedua*, Qadhie sebagai ulama dengan jabatan tertinggi dalam syariah Islam ialah *Jo Kalem*. Dia diangkat dan diberhentikan oleh sultan dan dibantu empat imam

kerajaan yaitu Imam Jiko, Imam Jawa, Imam Sangaji, dan Imam Moti. Selain keempat Imam tersebut terdapat imam kelima yaitu imam Bangsa, yang mengurus dan menyelenggarakan masalah secara khusus yang menyangkut para bangswan dan keluarganya.

Dalam meleksanakan tugasnya para imam di dibantu para khatib dan muaddin bagi setiap imam tersebut. Sebagai kelengkapan adminstrasi diangkat seorang khatib juru tulis untuk mengurus dan menyelenggarakan tata usaha hakim syarah kerajaan. Setiap wilayah yang diperintah oleh seorang *sangaji* (camat), diangkat seorang sebagai imam distrik. Wilayah kerjanya mencakup wilayah kecamatan tersebut. Jika seorang sangaji diberi gaji oleh sultan, maka imam distrik mengabdikan semata-mata karena Allah SWT. Kelengkapan imam distrik didampingi para khatib dan muaddin sampai pada aparat bawahannya imam kampung. (Leonard Y. Andaya, 1993).

Sesuai tradisi, setiap orang yang memasuki keraton harus berpakaian adat. Ruangan atau lingkungan keraton mempunyai keunikan tersendiri, sehingga setiap bobato/pemangku yang bertugas diistana, masing-masing menempatkan diri sebagaimana tugas yang diembannya. Masuk keluar istana diatur oleh tata tertib keraton (kadaton) dan tidak semua *bobato* bertugas disini. (L. Katoppo, 1984).

Urusan rumah tangga keraton diurus oleh pemangku-pemangku adat antara lain:

1. Imam Sadaha adalah ajudan pribadi sultan
2. Sawohi adalah protokoler istana
3. Sadaha Kadato adalah perlengkapan istana
4. Soseba Jotuli adalah petugas tata usaha istana
5. Saraha Kadato adalah pengurus perawatan benda-benda pusaka kesultanan
6. Soseba Kadato
7. Sadaha Kie

8. Fanyira Soa Ngare (Abdul Hamid, 2002).

Sementara itu, lembaga legislatif dalam Kesultanan Ternate disebut Dewan 18 (*Bobato nyagimoi setofkange*), terdiri dari wakil-wakil rakyat 41 marga yang berdomisili di Ternate. Kedelapan belas soa atau marga merupakan suatu *gemeinschaft* yang masing-masing soa mempunyai kepala soa/marga. Fungsi Dewan 18 yaitu (1). menentukan arah pembangunan. (2). Mengangkat sultan (kolano) dan memecat (*impeachment*). (3). Babato 18 sebagai pemegang kedaulatan, mengawasi sistem yang dijalankan kolano. Nama sistemnya asalah "*bala kusu se kano-kano*". Seperti disinggung, bahwa bobato 18 adalah pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan). Dalam mencapai musyawarah mufakat maka mekanisme kerjanya sebagai berikut:

1. Sahnya sidang dewan 18 jika di hadiri kapita laut
2. Kapita lau tidak mempunyai hak suara, sehingga tidak dapat mempengaruhi jalannya sidang dewan 18
3. Segala keputusan yang di ambil dewan 18 di sampaikan kepada kolano (sultan) untuk di bahas oleh pemeintah. Hasilnya dibawah kembali kepada dewan 18 untuk diminta pendapat dewan. Diberi kesempatan untuk meneliti hasil kompilasi kolano (sultan) ini di namakan idhin kolano diberikan kesempatan untuk menerima atau menolak dalam arti melakukan perubahan. Hasil perubahan ini dibawah lagi ke kolano (sultan) atas hasil perubahan ini kolano (sultan) melakukan perubahan dengan *TAU-RAHA* (Pemerintahan harian) setelah itu kolano (sultan) mengambil keputusan. Keputusan kedua dinamakan *Jaib Kolano*. Jaib Kolano

tidak dapat dirubah lagi. (Mudaffar Syah,2002).

Dalam struktur kelembagaan di atas, hal yang menarik adalah bahwa rekrutmen aristokrat di Kesultanan Ternate tidak hanya dipertimbangkan dari hubungan pertalian darah dan legitimasi politik, tetapi berkaitan dengan faktor representatif etnis yang mendiami Maluku Utara. Ini berarti bahwa masyarakat Maluku Utara terbagi habis kedalam unit-unit politik yang kecil dan dipersatukan melalui sistem perwakilan distrik. Ikatan-ikatan teritorial inilah merupakan landasan legitimasi kekuasaan sekaligus menjadi landasan integrasi eksisnya Kesultanan Ternate. Burger menyebut masyarakat Ternate telah memiliki kecanggihan dalam membangun struktur politik dan dinilai sebagai “organisasi kenegaraan bertaraf tinggi” (Burger,1982). Hal ini mempertegas apa yang dikemukakan AA GN Ari Dwipayana bahwa kekuasaan aristokrasi tidak selamanya menempatkan tokoh keturunan sebagai pusat kekuasaan, namun bertumpu pada beberapa orang bangsawan untuk menjalankan pemerintahan yang berpusat dalam area tertentu. (AA.GN. Ari Dwipayana,2004).

Seperti halnya berlaku pada masyarakat pada umumnya, *kadaton* mengenal adanya pelapisan social. Bangsawan dan pegawai istana merupakan dua macam pelapisan yang selalu ada didalam masyarakat istana. Pada umumnya antara kedua lapisan tersebut terdapat garis pemisah yang tegas. Kelompok bangsawan yaitu golongan yang masih berdarah dekat dengan raja, mendapat penghargaan lebih dari golongan lain. Jika bangsawan memperoleh status dari kelahiran, maka punggawa kerajaan atau pegawai istana mendapatkannya karena berprestasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya banyak juga bangsawan yang menjadi pegawai istana, sebaliknya banyak *abdi*

dalem bukan bangsawan diterima sebagai kerabat raja. Baik pada lapisan bangsawan , maupun pada lapisan punggawa kerajaan, yang dalam *kadaton* disebut sebagai *abdi dalem*, terdapat hirarki. Dalam hal ini menurut Darsiti Soeratman sebagai suatu komunitas keraton, yang memiliki kebudayaan sendiri, sering dihadapkan pada tradisi kecil yang berhasil menembus dinding-dinding keraton. (Darsiti Soeratman,2002).

ELITE KESULTANAN DALAM PENYEBARAN ISLAM

1. Bobato Dunia (Elite Pemerintahan)

Seperti di sebagian besar kerajaan, masyarakat istana mengakui adanya struktur hierarki yang berlapis-lapis. Raja menduduki jabatan tertinggi, disusul para bangsawan. Sultan dibantu dalam pemerintahannya oleh dewan kerajaan yang dikenal sebagai bobato. Anggota dewan ini adalah pejabat kerajaan yang menangani urusan agama (bobato) dan pemerintahan (dunia bobato).

Menurut Abdul Hamid Hasan (2002), bobato dunia mengacu pada pejabat yang bekerja pada lembaga kerajaan; ini termasuk Dewan Tertinggi Kerajaan (Gam Raha), Dewan Menteri, juga dikenal sebagai bobato madopolo, yang terdiri dari: Jogugu (perdana menteri), Kapita Lau (laksamana angkatan laut), Hukum Soa-sio (menteri dalam negeri), Hukum Sangaji (menteri luar negeri), Tulilamo (menteri sekretaris negara), dan Sangaji (pemerintah daerah atau gubernur).

Mereka mempunyai hubungan klien, yaitu hubungan antara penguasa politik tertinggi dengan seseorang yang diberi izin untuk menjalankan sebagian kekuasaan penguasa tersebut, karena mereka adalah pejabat yang dipilih dan dikukuhkan oleh sultan. Jabatan kaum bangsawan diturunkan secara turun-temurun (*dabo se barasi*) berdasarkan

perjanjian Formadiyah. Berbagai sumber yang diwawancarai menyatakan bahwa praktik ini masih dipertahankan hingga saat ini dan menjadi landasan perekrutan politik di Kesultanan Ternate. Saat ini memegang empat posisi kunci di Kesultanan Ternate adalah marga Marasa Oli, Toma Gola, Toma Ito, Jiko, Tabala, dan Toro Ngara: Gam Raha (dewan tertinggi kerajaan), Bobato Nyagimoi se Tofkange (badan legislatif), Fala Raha (badan penasihat sultan), dan Sabua Raha (empat hakim agung). Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintahan, hubungan sultan dan bangsawan dapat dikatakan bersifat horizontal karena kedudukan dan kekuasaan bangsawan ditentukan oleh asas keturunan, bukan keterampilan. Sudah menjadi kebiasaan bagi para sultan Ternate untuk memberikan sebidang tanah yang disebut kaha cocatu, untuk bercocok tanam kepada bobato dunia. Bobato dunia biasanya berada di dekat istana sultan. (Abdulrahman Yusup 2003).

Sultan memberikan kepercayaan penuh kepada bobato dunia untuk menjalankan tanggung jawabnya sehari-hari dalam ranah pemerintahan. Bobato dunia mempunyai hubungan patron-klien dengan masyarakat karena mendapat kepercayaan penuh dari sultan. Meskipun rakyat mempunyai kewajiban untuk melayani dan menunjukkan rasa hormat, kaum bangsawan menawarkan keamanan dan perlindungan. Masyarakat melihat bobato di dunia memiliki otoritas tradisional, berada di puncak hierarki, dan hak-haknya diakui dari generasi ke generasi. Agar silaturahmi ini dibangun atas landasan cinta kasih, kesetiaan, dan pengabdian, serta keyakinan bahwa bobato dunia dengan segala manfaat dan kemampuannya mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ibukota kerajaan adalah rumah bagi bobatos dunia, namun tanggung jawab mereka tidak berakhir di situ. Para pejabat ini juga

mengelola sejumlah besar wilayah terpencil yang secara geografis jauh dari pusat kerajaan. Meskipun demikian, mereka menganggap mengabdikan pada kerajaan merupakan suatu kehormatan besar, dan mereka selalu rela menyerahkan segala milik mereka demi menjamin keamanan kerajaan (Anas Dinsie & Rinto Taib, 2010).

Selain badan legislatif, dewan yang dikenal dengan Bobato Nyagimoi se Tufkange merupakan bagian dari struktur organisasi Kesultanan Ternate. Perwakilan dari delapan belas klan yang dikenal sebagai Soa membentuk organisasi ini. Di Ternate, Soa merupakan singkatan dari 41 Soa. Sembilan pemimpin klan Soa-Sio dan sembilan pemimpin klan Sangaji menjadi anggota dewan. Selama beberapa generasi, kedua klan bangsawan tersebut menduduki posisi penting di Kesultanan Ternate.

Mirip dengan perusahaan yang disebutkan di atas, faktor terkait etnis dan keturunan juga diperhitungkan saat merekrut karyawan baru untuk Bobato Nyagimoi Setofkange. Hal ini menyiratkan bahwa leluhur berfungsi sebagai landasan bagi integrasi dan landasan bagi legitimasi kekuasaan. Sesuai dengan ciri dan budaya masing-masing suku, dewan ini menetapkan norma dan praktik yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dari sinilah hukum adat Ternate berasal.

Lembaga ini telah menetapkan hukum-hukum dasar yang harus dipatuhi oleh sultan, bangsawan, dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya. Filsafat negara Kesultanan Ternate yang dikenal dengan Kie se Gam Magogugu Matiti Rara didasarkan pada enam prinsip dasar. Masing-masing dari mereka adalah:

1. Hukum dasar yang dikenal dengan Adat se Atorang mengatur tugas dan hak warga negara terhadap kerajaan, serta pemilihan sultan dan pejabat politik lainnya.
2. Aturan kedua disebut Istiadatse Kabasarang, yang menguraikan

kewenangan dan hak kesultanan, termasuk hak atas gelar tertinggi, takhta, mahkota, istana, dan gelar lainnya.

3. Galib se Likudi adalah peraturan hak-hak masyarakat yang meliputi kedudukan dan keistimewaan soa (marga) berdasarkan garis keturunannya, hak milik seseorang berdasarkan hak ulayat, dan kedudukan orang asing yang diterima dalam soa (marga).
4. Ngale se Duku, atau pengaturan bentuk kebudayaan masing-masing suku dan gabungan pemanfaatannya sesuai dengan adat istiadatnya masing-masing.
5. Sere se Doniru adalah norma-norma sosial yang mengatur kehidupan seni, budaya, dan adat istiadat yang berkembang dari hubungan sosial yang dapat diterima bersama.
6. Cing se Cingare, yaitu hukum yang mengatur cara laki-laki dan perempuan berinteraksi dalam masyarakat, termasuk perkawinan dan ritual adat. Undang-undang ini memperlakukan semua anggota pasangan sebagai satu kesatuan dengan hak dan tanggung jawab yang sama. (1987, Shaleh A. Putuhena).

Kewenangan sultan sebagai bangsawan hanya sebatas menunjuk kelompok bangsawan untuk menjalankan tugas resmi. Kelompok bobato nyagimoi setofkange (badan legislatif) harus diajak berkonsultasi sebelum sultan dapat mengambil semua keputusan akhir dalam hal ini. Menurut de Clereq, dewan yang terdiri dari delapan belas orang lanjut usia ini bertindak sebagai pengadilan tinggi pada abad ke-19, yang memutuskan masalah perang dan perdamaian, memilih pejabat lokal, menetapkan adat istiadat, dan mengatur urusan sehari-hari dalam masyarakat. Kesultanan Ternate kemudian

mengadopsi persatuan atau ikatan kelompok ini sebagai semboyan resminya. Ini untuk makati nyinga, om doru yo momote, fo magogoru fo madodara, doka gosora se balawa. (Mari kita memasak bersama, jatuh cinta bersama, dan memupuk rasa saling mencintai dan sayang; anggap satu sama lain sebagai pala dan bunga pala). (De Clereq, 2001).

Tersebar di beberapa pulau di wilayah Maluku Utara, antara lain Halmahera Barat dan Utara, Pulau Sanana, Makian, dan Kayoa, terdapat kerajaan maritim yang dikenal dengan nama Kesultanan Ternate. Dua jenis jabatan, yang dikenal sebagai salahakan (utusan sultan) dan sangaji (semacam bupati), didirikan untuk mengatur, mengatur, dan melindungi kepentingan sultan di wilayahnya. Jika pertimbangan genealogis diperhitungkan dalam pengangkatan bobato madopolo (dewan menteri), maka pengangkatan sangaji selalu ditentukan oleh syarat hubungan darah sultan (Irza Arnita Djafar, 2003).

Para sultan Ternate sering menggunakan politik perkawinan sebagai salah satu strategi mereka untuk meningkatkan kedudukan dan otoritas mereka di tingkat bawah. Sepenuhnya bergantung pada kepercayaan dan kesetiaan, jaringan sosial terjalin seperti ikatan feodal. Pemerintah Hindia Belanda memberikan konsesi kepada sultan dan bangsawan pada masa kolonial agar mereka dapat memanfaatkan kekuasaan adatnya untuk memajukan hegemoninya. Ia mengarahkan seluruh pemikiran politiknya kepada perwakilan kesultanan, sehingga meningkatkan hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat.

Sangaji diangkat dan diberhentikan oleh sultan dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah, dan mereka mempunyai tugas untuk mengawasi kepentingan teritorial sultan. Sangaji mempunyai dua tujuan politik yang berbeda, khususnya di wilayah Halmahera

Barat dan Utara. Selain menjadi penguasa yang disetujui sultan, mereka mempunyai tugas untuk menjaga hubungan antara distrik mereka dan kadaton. Contoh paling nyata dari hubungan ini terdapat dalam sistem nagse (upeti), yang mengatur berbagai kewajiban masyarakat terhadap sultan. Hasilnya, mereka menduduki jabatan dewan kerajaan (*bobato madopolo*) yang berada di tengah-tengah kerajaan. Mereka juga berkontribusi dalam penyusunan berbagai kebijakan kerajaan dan hukum adat. (EKM Masinambaw, 1980).

Sekalipun status para *sangaji* dalam struktur kekuasaan berada di bawah dewan kerajaan, namun dalam distrik masing-masing, mereka seperti “raja”. Hal ini tampak dari kelengkapan staf pemerintahan mereka. Rekrutmen stafnya merupakan hak prerogatif *sangaji* yang berasal dari keluarga-keluarga inti utama dalam distrik (negeri induk). Bersama *sangaji* dan keluarganya, anggota-anggota staf dan keluarganya itu merupakan suatu lapisan tersendiri yang berdiam di kampung tersendiri. Menurut berbagai sumber yang diwawancarai, wewenang para *sangaji* tidak terbatas pada masalah-masalah politik. Sebagai wakil sultan, para *sangaji* juga mengurus peradilan dalam menegakan norma-norma adat dan menjatuhkan sanksi-sanksi kepada pelanggarnya. Selain itu, mereka juga memelihara perbatasan-perbatasan di seluruh wilayah kekuasaannya. (R.Z. Leirissa, 2002).

Salahakan, atau utusan sultan, ditempatkan di Kepulauan Banggai dan Sula pada masa ini. Pejabat daerah ini diharuskan untuk melindungi, mengawasi, dan memutuskan kasus perdata dan pidana. Selain itu juga mengumpulkan upeti yang secara berkala diberikan kepada kadaton. Kedua pejabat pemerintahan ini berasal dari pusat dan diangkat oleh sultan. Oleh karena itu, mereka dapat diganti sesuai kebijaksanaan sultan. Dastar ngongare,

sorban hitam dan jubah panjang, serta lencana kerajaan, merupakan simbol pembeda status yang dikenakan oleh *sangaji* dan salahakan. Satu-satunya orang yang berwenang mengenakan jubah putih dan sorban adalah sultan. Terdapat 33 *sangaji* yang tersebar di seluruh wilayah Kesultanan Ternate, antara lain di Pulau Makian, Kayoa, Gane, Jailolo, Sahu, Ibu, Loloda, Morotai, Galela, Tobelo, Kao, Sula, Mangoli, dan Taliabu. Istilah “jiko makolano” (penguasa tanjung) diberikan kepada *sangaji* itu. Andaya, Leonard Y. (1983).

Meskipun dalam struktur Kesultanan Ternate terdapat kelas elite yang terbuka, seperti para *Bobato Madopolo* (dewan menteri) dan *Bobato Nyagimoi se Tufkange*, yang diangkat berdasarkan perwakilan etnis, tetapi dalam beberapa alasan keamanan untuk menjaga stabilitas politik antara pusat dan daerah, sultan memilih dan mengangkat para *sangaji* dari kalangan keluarganya maupun dari kalangan bangsawan lain. Ada beberapa jabatan yang pejabatnya diangkat berdasarkan faktor keturunan, seperti *Bobato Nyagimoi se Tufkange* dan *Gam Raha*. Jabatan perdana menteri (*jogugu*) misalnya, harus diduduki oleh pengikut sultan yang paling dipercayai atau tangan kanannya. Biasanya ditempati oleh mereka yang berasal dari etnis Makian. Walau demikian, kecenderungan untuk memilih berdasarkan keturunan dapat juga ditemukan dalam jabatan ini.

Sultan memang tetaplah merupakan pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan *jogugu* (perdana menteri). Dalam hubungan ini, menurut Djoko Suryo, sultan dipandang menempati kedudukan sentral sebagai penghubung antara *jagad cilik* (*micro cosmos*) atau jagad tempat manusia hidup di dunia termasuk di dalamnya istana dan kerajaannya dengan *jagad gedhe* (alam semesta raya) atau jagad sang khalik

(*macro cosmos*). Dalam hubungan ini, sultan memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memerintah kerajaanya sesuai dengan tujuan idealnya, yakni menciptakan kehidupan yang teratur, aman, tenteram, damai, subur, makmur, dan sejahtera. (Djoko Suryo, et al, 2002).

2. Bobato Akhirat (Elite Keagamaan)

Persoalan tentang kapan dan bagaimana proses rekrutmen *boboto akhirat* menjadi elite dalam kesultanan hingga kini masih membutuhkan kajian yang mendalam. Berdasarkan keterangan-keterangan lisan atau cerita beberapa penulis hikayat, seperti Naidah (hikayat Ternate), sebelum diangkat menjadi sultan Zainal Abidin berangkat ke Jawa dan memperdalam agama Islam di Giri. Setelah kembali barulah agama Islam mulai memasuki struktur pemerintahan. Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Naidah sebagai berikut:

“Madero Sijou Tjitjo sareat ikoewat hango ino simangofa kolano Gapij Baguna simara oena sima ngofa Kitjil Djainalabudin isidie toma kaha Djawa iwosa iman simpoernawa iman Islam, tauhid Marifat Allah.” (P. van der Crab, 1982).

Dalam struktur keagamaan (*boboto akhirat*) di Kesultanan Ternate, sultan adalah pemimpin tertinggi atau imam agung. Sebagai imam agung, sultan berkewajiban menjaga, melindungi, menyebarkan dan melestarikan agama Islam. Dalam kedudukannya sebagai seorang imam, sultan dibantu oleh para ulama yang memiliki pangkatnya sendiri-sendiri dan dilabelkan dari asal usul mereka. Ulama tertinggi yang membantu sultan di sebut *kadhi*, biasanya disebut *jo kalem*. *Kadhi* mengurus masalah yang bertalian dengan agama, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan sultan dan keluarganya. Keberadaan jabatan *kadhi* telah ada sejak zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin

(1486-1500). (Shaleh A. Putuhena, *op. cit*, hlm. 1989).

Sebagai ulama tertinggi di kerajaan, kedudukan *kadhi* sangat penting. Ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa tidak boleh ada satu vonis atau hukuman yang ditetapkan tanpa kehadiran *kadhi*. Menurut hasil wawancara dengan *jou kalem* (imam agung), kedudukan *kadhi* begitu penting karena sebagai salah satu anggota dewan kerajaan, kalau *jogugu* (perdana menteri) berhalangan hadir, maka *kadhi* yang mengantikannya. Menurut Antonio Galvao, di Kesultanan Ternate terdapat seorang *kadhi (casis general)*. *Kadhi* mengepalai para imam di mesjid kesultanan yang terdiri dari empat orang imam, empat orang *modim* (muadzin), dan mengepalai pegawai-pegawai dari masjid-masjid lainnya di Ternate. *Kadhi*, para imam, dan khatib termasuk dalam urusan keagamaan yang disebut *bobato akhirat*. (Antonio Galvao, 1978).

Lima orang pendeta membantu *kadhi* dalam melaksanakan tugasnya. Imam Jiko, Imam Sangaji, Imam Moti, Imam Java, dan Imam Bangsa adalah limanya. Kecuali Imam Bangsa, empat imam dalam hierarki Kesultanan Ternate bertanggung jawab dalam penyiaran agama, menyelenggarakan perkawinan dan pemakaman, serta pembagian warisan di tingkat kabupaten.

Sedangkan Imam Bangsa secara eksklusif mengawasi dan merencanakan urusan sultan, bangsawan, dan keluarganya. Jika dicermati tujuan dan perannya, kami menemukan bahwa kelompok agama ini secara strategis menduduki posisi tinggi di kalangan elite agama. Letaknya yang strategis berasal dari kedudukannya baik resmi maupun tidak resmi di kecamatan, desa, dan kadaton (wilayah kesultanan). Mirip dengan perekrutan *bobato* di seluruh dunia, pengangkatan *bobato* di akhirat ditentukan oleh keterwakilan etnis, bukan ikatan darah.

Di bawah para imam ini terdapat jabatan yang disebut *Khatib*. Jumlah mereka juga lima orang sama dengan jumlah para imam. Para *khatib* ini terdiri dari *khatib Jiko, Jawa, Sangaji, Moti dan Bangsa*. Setiap wilayah yang diperintah oleh seorang sangaji maka diangkat seorang imam distrik dimana wilayah kerjanya mencakup imam distrik. Dalam menjalankan tugasnya imam distrik didampingi oleh para khatib dan mu'addin, begitu pula sampai pada aparat bawahannya imam kampung. Paling akhir dalam struktur *bobato akhirat* ini ditempati oleh para modin dan muadzin. Sebagai kelengkapan administrasi diangkat seorang khatib juru tulis untuk mengurus dan menyelenggarakan tata usaha kerajaan. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Cambier.

Kegiatan para *bobato akhirat* yang dengan tekun melaksanakan pengajian, melayani ibadah di masjid, upacara sunatan, dan pernikahan. Suatu hal yang terutama menarik perhatian pejabat tersebut adalah pelaksanaan puasa yang selalu diawasi dengan ketat oleh para penguasa keagamaan itu. Demikian pula larangan makan daging babi yang ada di kalangan penduduk Halmahera yang tersebar secara luas.

Dalam kehidupan masyarakat Ternate, kedudukan Bobato di akhirat sangatlah penting. Hal tersebut memunculkan anggapan bahwa pusat magis-religius kerajaan terletak di ibu kota kerajaan, atau istana, selain pusat politik dan budayanya. Anggapan bahwa bobato akhirat memiliki kemampuan magis yang sama dengan sultan bermula dari perannya sebagai Rasul Tubaddilur. Bobato juga diyakini akan menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan setiap orang di akhirat. Doa fere kiye (mendaki gunung), doa kololi kie (mengelilingi gunung), doa keselamatan, dan doa upacara pelantikan sultan semuanya mewakili hal tersebut (Christiaan Frans

van Fraasen, 1978).

Otoritas kharismatik yang dimiliki para *bobato akhirat* yang dipengaruhi latar belakang agama yang dikenal oleh masyarakat Ternate berhubungan dengan wawasan mitologis. Konsep ini dilukiskan dalam suatu kepercayaan bahwa para *bobato akhirat* (ulama) memiliki kekuatan magis dan kosmologis. Anggapan seperti ini sama dengan konsep kekuasaan pada orang Jawa, bahwa raja dianggap sebagai penitisan atau keturunan dewa yang oleh Heine Gelderen disebut dewa raja. (B. Soelarto, 1982).

Simbol politik tradisional seperti kolano (raja) tetap bertahan di kerajaan Ternate bahkan setelah struktur pemerintahannya berubah dari kerajaan menjadi kesultanan, dengan sultan bertindak sebagai pemimpin agama (Amir Mukminin). Meskipun demikian, bagi masyarakat Ternate, peralihan dari pemerintahan kolano (kerajaan) ke kesultanan telah terjadi. Meski begitu, peran dan fungsi kata sultan dan kolano berbeda. Peran kolano terus digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan politik dalam negeri. Sebaliknya, peran sultan lebih terfokus pada kepentingan romantisme. di seluruh dunia. Bahkan, ia menegaskan gelar tertinggi bukanlah sultan melainkan kolona karena hanya kolona yang berwenang mengeluarkan iddin, menurut salah satu sumber. (Syah Mudaffar, 2009).

Kewenangan inipun berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, misalnya hanya *kolona* yang memiliki hak-hak veto (*jaib kolano*), atas lembaga legislatif (*Bobato Nyagimoi Setofkange*) sampai sekarang tetap dimilikinya. Bahkan fungsi dan hak yang ada semakin diperluas dengan adanya penggunaan sebutan sultan. Di mana sultan berperan ganda yakni menjalankan fungsi dalam bidang pemerintahan dan keagamaan. Dalam hal agama sultan adalah imam agung yang menjaga dan melindungi penyebaran dan

kelestarian agama Islam atau kewajiban sultan untuk melindungi dan menyebarkan Islam. Poin inilah menjadi elemen baru yang ditambahkan pada kewajiban-kewajiban tradisional seorang *kolano*. Demikian pula, dengan posisinya sebagai *imam besar*, merupakan fungsi baru yang ditambahkan kepadanya. (Shaleh A. Putuhena, *op.cit.*,1978).

KESIMPULAN

Sultan menduduki posisi sentral kekuasaan dalam sistem politik Kesultanan Ternate. Dengan kekuasaan yang sangat besar, sultan berada di puncak hierarki. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa ciri raja atau ratu, seperti gelar, pusaka, dan adat istiadat keluarga, yang kesemuanya berfungsi untuk menjunjung kewibawaan sultan sebagai penguasa. Secara teoretis, Sultan adalah Tubaddilur Rasul, pengganti Rasul berkewajiban memimpin soal-soal keagamaan. Sultan Ternate dianggap sebagai Imam Besar, yakni sebagai kepala dan pelindung agama Islam walaupun gelar itu tidak diikutsertakan pada nama resmi sultan seperti halnya sultan-sultan Mataram Islam (Jawa).

Dalam struktur kesultanan, telah dijumpai lembaga-lembaga keagamaan, di samping lembaga-lembaga tradisional yang telah ada. Sultan sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa badan pemerintahan. Dewan ini berfungsi meletakkan adat istiadat dan aturan dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam struktur kesultanan terdapat semacam Dewan Perwakilan Rakyat, yang disebut Gamraha. Ada kelompok yang mempunyai kekuasaan dan kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan. Sebagai kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai, kedua kelompok tersebut disebut dengan Pareto dan Mosca. Harold Laswell menciptakan istilah "elit" untuk

menggambarkan mereka yang memegang kekuasaan.

Menyusul masuknya dan tumbuhnya Islam di Ternate, terjadi pergeseran tidak hanya di bidang keyakinan namun juga di bidang lain seperti politik, kemasyarakatan, dan pemerintahan. Struktur politik inti dikembangkan dari struktur sosial di pusat pemerintahan ini. Struktur ini terdiri dari Sultan, pejabat yang membantunya menjalankan pemerintahan, dan dewan perwakilan yang terdiri dari bangsawan dan pejabat istana untuk mewakili kepentingan Sultan. Perkembangan kesultanan sendiri mencerminkan perubahan dan kemajuan dalam struktur pemerintahannya. Sebagai kepala negara, Sultan berperan sebagai pelindung masyarakat dan agamanya. Tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan tambang yang berbentuk seperti payung dan berfungsi sebagai pelindung, serta lambang kerajaan yang berbentuk seperti gunung dan berfungsi sebagai penyangga. Peran Sultan sebenarnya lebih bersifat spiritual dibandingkan material. Sultan mempunyai sejumlah keistimewaan yang membedakannya dengan orang lain karena mereka adalah orang suci. Ciri khas sultan diwakili oleh beragam simbol yang masing-masing memiliki makna tersendiri.

Daftar Pustaka

- A.B. Lopian. (1980). Dalam pengantar *Memorie van Overgave J.H. Tobias (1857)- Memorie van Overgave C. Bosscher Residen Ternate (1859)*. Jakarta: ANRI.
- Abdul Hamid Hasan. (2000). *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Abdul Hamid Hasan dan Yusup Abdulrahman. (1995). *(Hubungan Kerajaan Ternate dan Tidore dalam Sejarah Maluku Kie Raha)*. Ternate: Universitas Khairun.

- Anas Dinsie & Rinto Taib. (2010). *Ternate Sejarah, Kebudayaan & Pembangunan Pedamaian Maluku Utara*. Ternate: LeKRa-MKR.
- Adnan Amal. (2007). *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia.
- AA GN Ari Dwipayana. (2004). *Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*. Yogyakarta, IRE Press.
- B. Soelarto, *Sekitar Tradisi Ternate*. (1982). Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan RI.
- C.L. Voorhoeve. (1980). "The Non-Austronesia Languages in the North Moluccas" dalam Masinambaw EKM. (ed), *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi*. Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- Christiaan Frans van Fraasen Ternate. (1987). "De Molukken en De Indonesische Archipel, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia". *Disertasi*. Universiteit Leiden.
- Clifford Geertz. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Clive Day. (1996). *The Policy and Administration of the Dutch in Java*. London: Oxford University Press.
- Djoko Suryo, et al. (2001). *Agama dan Perubahan Sosial Studi: Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial Politik Indonesia*. Yogyakarta: UGM LKPSM.
- Darsiti Soeratman. (2002). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Djoko Soekiman. (2000). *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat di Jawa (Abad XVIII – Medio Abad XX)*. Yogyakarta: yayasan Benteng Budaya.
- David Henley, et al. (2010). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- F.S.A. de Clercq. (2007). Ternate: Karesidenan dan Kesultanan. Terjemahan Noer Fitriyanti dari, *Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate*, 1890. Ternate: Komunitas Uma Sania.
- Gazal, Syarifuddin. (2008). "disertasi yang berjudul "Jou Se Ngofa Ngare: Studi Transformasi Mistik Islam dalam Adat Kesultanan Ternate" (Analisis Antropologi Agama) Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hanna Willard A& Des Alwi. (1996). *Ternate dan Tidore Masa Lalu Penuh Gejolak*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Herry RD.Nachrawy. (2003). *Peranan Ternate Tidore Dalam Pembebasan Irian Barat*. Ternate, Yayasan Kie Raha.
- Hidayatullah M. Sjah. (2006). *Suba Jou, Gudu Moju Si To Suba Ri Jou Si To Nonaku* (Aku Sembah Pada Tuhan Karena Aku Kenal), Yayasan Gema Suba. Ternate.
- Jusuf Abdulrahman. (2002). *Kesultanan Ternate; Dalam Jou Ngon Ka Dada Madopo Fangare Ngona Ka Alam Madiki*. Manado: Media Pustaka.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Leonard Y. Andaya. (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- L. Katoppo. (1984). *Nuku Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*. Jakarta: Sinar Harapan.

- L. E. Visser, (ed). (1994). *Halmahera and Beyond, Social Science Research in The Moluccas*. Leiden: KITLV Press.
- Mudaffar Syah. (2009). *Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia*. Ternate : Goheba.
- Radjiloen L. (1982). *Dataran Tinggi Foramadiahi adalah Ternate Awal Ke Dataran Rendah Limau Jore-jore Sebagai Ternate Akhir*, Ternate: Depdikbud.
- Rustam Hasim. (2021). “*Masyarakat dan Kebudayaan Ternate Dalam Perspektif Sejarah*” *Jurnal Geocivik Universitas Khairun*. Ternate.
- Rustam Hasim. (2020). From The Myth of seven Angelic Spirit to Relegious Legitimation: Kesultanan Ternate source of Power. *Jurnal Sasdya UGM*.
- Syahril Muhammad. (2006). *Kesultanan Ternate: Sejarah Sosial Ekonomi & Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutrisno Kutoyo. (1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sagaf S. Pettalongi. (2012). *Adat Segulaha Dalam Tradisi Masyarakat Kesultanan Ternate. el Harakah*, 14 (2).
- Sukardi Bay. (2022). *Mengenal Diri Dalam Falsafah ‘Jou Se Ngofa Ngare’ Perspektif Al-Qur’ān*. *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Shaleh A. Putuhena. (1987). *Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate dan Agama Islam*. Jakarta: Leknas LIPI.